

**PERAN LEMBAGA ADAT NAGARI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN NAGARI DI NAGARI SITUJUAH BATUA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

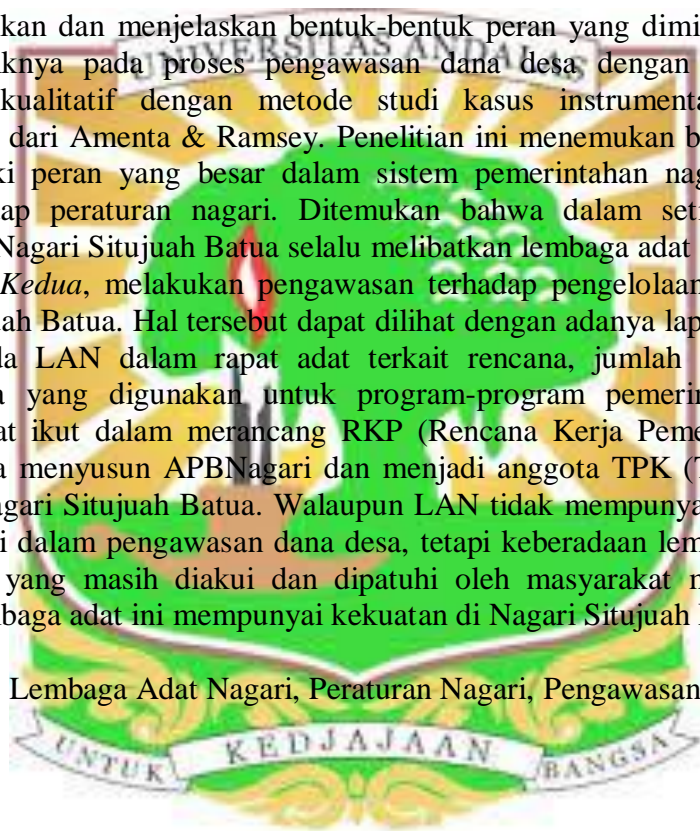
PADANG

2022

ABSTRAK

Lembaga Adat Nagari (LAN) mempunyai kewenangan melestarikan dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan adat istiadat. Namun, sebuah keunikan terlihat ketika LAN melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah nagari karena tidak adanya transparansi terhadap pengalokasian dana desa. Atas keresahan masyarakat tersebut, pemerintah nagari beserta lembaga-lembaga nagari setempat melahirkan sebuah peraturan nagari tentang pengawasan alokasi dana desa berbasis hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk-bentuk peran yang dimiliki oleh LAN dalam praktiknya pada proses pengawasan dana desa dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental serta teori kelembagaan dari Amenta & Ramsey. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga adat memiliki peran yang besar dalam sistem pemerintahan nagari. *Pertama*, peran terhadap peraturan nagari. Ditemukan bahwa dalam setiap peraturan-peraturan di Nagari Situjuh Batua selalu melibatkan lembaga adat untuk dimintai persetujuan. *Kedua*, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Batua. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya laporan oleh wali nagari kepada LAN dalam rapat adat terkait rencana, jumlah anggaran, dan sumber dana yang digunakan untuk program-program pemerintahan nagari. Lembaga adat ikut dalam merancang RKP (Rencana Kerja Pemerintah) nagari dalam rangka menyusun APBNagari dan menjadi anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Nagari Situjuh Batua. Walaupun LAN tidak mempunyai legalitas dan otoritas resmi dalam pengawasan dana desa, tetapi keberadaan lembaga adat dan hukum adat yang masih diakui dan dipatuhi oleh masyarakat menjadi alasan mengapa lembaga adat ini mempunyai kekuatan di Nagari Situjuh Batua.

Kata kunci : Lembaga Adat Nagari, Peraturan Nagari, Pengawasan Dana Desa



ABSTRACT

Nagari Traditional Institutions (LAN) have the authority to preserve and handle problems related to customs. However, a unique thing is seen when LAN supervises the management of village funds in Nagari Situjuh Batua. Lack of public trust in the nagari government due to the lack of transparency in the allocation of village funds. Due to the community's unrest, the nagari government and local nagari institutions issued a nagari regulation on monitoring the allocation of village funds based on traditional law. This study aims to describe and explain the forms of roles that LAN has in practice in the village fund monitoring process using qualitative approach, instrumental case study method and institutional theory from Amenta & Ramsey. This study found that traditional institutions have a major role in the nagari government system. First, the role of nagari regulations. It was found that in every regulations in Nagari Situjuh Batua always involve traditional institutions for approval. Second, to supervise the management of village funds in Nagari Situjuh Batua. This can be seen in the reports by the wali nagari to LAN in traditional meetings regarding plans, budget amounts, and sources of funds used for nagari government programs. Traditional institutions participate in designing the Nagari's RKP (Government Work Plan) in order to prepare the APBNagari and become members of the Situjuh Batua Nagari TPK (Activity Implementation Team). Although LAN does not have legality and official authority in overseeing village funds, the existence of traditional institutions and traditional laws that are still recognized and obeyed by the community is the reason why this traditional institution has power in Nagari Situjuh Batua.

Keywords : *Nagari Traditional Institutions, Nagari Regulations, Village Fund Supervision*

